

**KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN
BOYOLALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA ANAK**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Eko Ari Wibowo

NIM: C.100.110.094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H, M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H, M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum.)

**KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN
BOYOLALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA ANAK**

Eko Ari Wibowo
C.100.110.094
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ekoariwibowo504@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Anak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui kebijakan BP3AKB dalam merintis Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui kendala apa saja yang sering di jumpai BP3AKB dalam menjalankan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali. Kebijakan BP3AKB dalam rangka pemenuhan hak anak di landasi atas Perda Kabupaten Boyolali 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Implementasi pemenuhan hak anak dilaksanakan berdasarkan PerMenNeg PP dan PA RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Implementasi Pemenuhan Hak Anak di laksanakan dengan cara melaksanakan kerja sama antara BP3AKB dengan SKPD yang mempunyai wewenang dalam pemenuhan Hak Anak. Kendala yang di hadapai BP3AKB yaitu komitmen pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, pemenuhan hak anak, pencegahan tindak pidana anak.

ABSTRACT

The research, entitled Policies of Kota Layak Anak in Boyolali for crime Prevention of Children. The purpose of this research is; To find out the policy of BP3AKB for create Kota Layak Anak in the district of Boyolali, to know the Implementation of Kota Layak Anak in the district of Boyolali, to know what the obstacles are often encountered in implementing by BP3AKB struggle of Kota Layak Anak program in the district of Boyolali. BP3AKB policy in order to meet children's rights at the top Boyolali District Regulate foundation 14 Year 2013 regarding Child Protection. Implementasi Fulfillment of child rights held by PerMenNeg PP and PA No. 12 Year 2011 on indicators Regency / City Eligible Children, Law No. 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Implementation of Children's Rights is implemented by carrying out cooperation between BP3AKB with SKPD who has authority in the fulfillment of child rights. Constraints the BP3AKB fight is commitment of employees that still need to be improved.

Keywords: government policy, the fulfillment of child rights, prevention crime of the cild.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya untuk dilindungi. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Menurut Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.² Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convebtion On The Rights Of The Cild*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dengan keadaan bebas dan bermartabat.⁴ Jika dalam tumbuh kembang anak tidak terkontrol oleh orang tua, masyarakat serta pemerintah pada khususnya maka akan berdampak pada lahirnya generasi yang tidak bermartabat seperti terjadinya kenakalan anak yang berimbas anak yang bersangkutan berhadapan dengan hukum. Hal ini seperti kasus pidana dengan pelaku anak yang terjadi di Boyolali yang telah diputus oleh Pengadilan dengan nomor perkara berdasarkan Putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2015PN.Byl. Seorang anak laki-

¹ Lihat Pasal 28B Ayat 2. *UUD 1945*.

² Lihat Pasal 1 Angka 1, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

³ Lihat Konsideran Poin C, Dalam *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁴ Shanti Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 10.

laki bernama dengan nama samaran WAWAN Bin SUPARNO yang baru berumur 14 tahun telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap pengendara sepeda motor untuk merebut sejumlah uang dan HP milik korban di Boyolali. Anak tersebut melaksanakan aksinya bersama beberapa temanya yang sudah dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian dari BAPAS ternyata si anak ini merupakan korban keluarga berantakan (*broken hoom*).⁵ Peristiwa yang demikian tersebut bisa timbul karena kurangnya kesadaran dalam memberi perhatian terhadap sang anak baik perhatian dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah akan kepentingan sang anak dengan cara memberikan sebuah contoh keteladanan yang baik “taat hukum”. Pada awalnya ada dugaan yang kuat, bahwa anak yang di lahirkan di dunia, merupakan makhluk yang sama sekali bersih.⁶ Oleh karena itu pemerintah pusat dalam rangka mengimplementasikan kebijakannya tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (tingkat kabupaten/kota) untuk berorientasi kepada anak dalam membuat kebijakannya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan penulis uraikan antarlain; (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Boyolali dalam merintis Kota Layak Anak di wilayahnya? (2) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali? (3) Kendala apa saja yang sering dijumpai BP3AKB dalam menjalankan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali?

⁵ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 01/ Pid. Sus. Anak / 2015/ PN. Byl*, dalam www.putusan.mahkamahagung.go.id, Di Akses Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2015, Pukul 21;14 Wib.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 61.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.⁷ Menggambarkan mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dalam menjalankan Program Kota Layak Anak di Boyolali dalam rangka pemenuhan Hak Anak. Pendekatan penelitian yang akan di gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian *normatif-empiris*. Sifat *normatif*,⁸ dalam penelitian ini ditunjukan pada rumusan masalah nomor satu yaitu pengkajian terhadap pengkajian pemerintah Kabupaten Boyolali terkait dengan Kota Layak Anak. Sedangkan isitilah '*empiris*' (inggris; *empirical*) artinya bersifat nyata.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Merintis Kota Layak Anak di Wilayahnya

Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹⁰ Pelaksanaan kebijakan tersebut maka diperlukan sebuah komponen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Menurut Charles O. Jhones kebijakan terdiri

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 25.

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 11

⁹ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal. 61.

¹⁰ Retno Muningsar, 2012, *Pengantar Ilmu Kebijakan*, hal. 3, Dalam <http://himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2014/04/Pengantar-Ilmu-Kebijakan-Minggu-2-2012.pdf> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 17;07 Wib.

dari komponen-komponen yang anatara lain sebagai berikut;¹¹ (a) Goal atau tujuan yang di inginkan. (b) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan. (c) Program yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. (d) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program . (e) Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Pencapaian pemenuhan hak anak di Kabupaten Boyolali oleh BP3AKB didasarkan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak anak tersebut telah tercantum dalam 31 Indikator Kota layak anak. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut;¹²

Penguatan kelembagaan meliputi;¹³ (1) Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Peenuhan HAK dan Perlindungan Anak. (2) Presentase Anggaran Pemenuhan HAK dan Perlindungan Anak. (3) Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) Terlatih KHA. (4) Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Masa Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. (5) Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. (6) Jumlah Kegiatan Inovatif.

¹¹ *Pengertian Kebijakan Publik Dan Pemerintah Definisi Menurut Para Ahli Serta Komponenya*, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-publik-da.html> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 18;35 Wib.

¹² *Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Edisi 2015)*, Berkas di peroleh dari dokumen BP3AKB Kabupaten Boyolali Pada hari Senin Tanggal 27 April 2015 Pukul 08; 15 Wib.

¹³ Ibit, hal. 1.

Klaster I tentang hak sipil dan kebebasan yang meliputi;¹⁴ (1) Presentase Anak Yang Di Regristasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak. (3) Presentase Forum Anak Termasuk Kelompok Anak, Yang Ada di Kabupaten Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan. (4) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak.

Klaster II tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi;¹⁵ (1) Presentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun. (2) Tersedia Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/Keluarga Yang Memberikan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak. (3) Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan.

Klaster III tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi;¹⁶ (1) Angka Kematian Bayi (AKB). (2) Prevalasi Gisi Buruk, Gisi Kurang. Stunting dan Gizi Lebih Pada Balita. (3) Pesentasi ASI Eksklusif. (4) Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA). (5) Presentase Imunisasi Dasar Lengkap. (6) Jumlah Lembaga Yang Memberikan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Bagi Anak Dengan Disabilitas. (7) Presentase Anak dari Keluarga Miskin Yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan. (8) Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih. (9) Tersedia Kawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Klaster IV tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang meliputi;¹⁷ (1) Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini. (2) Presentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun. (3) Presentase Sekolah Ramah Anak (SRA). (4)

¹⁴ *Ibit*, hal. 7.

¹⁵ *Ibit*, hal. 11.

¹⁶ *Ibit*, hal. 14.

¹⁷ *Ibit*, hal. 20.

Jumlah Sekolah Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Yang Aman dan Ke Dari Sekolah. (5) Tersedia Fasilitas Untuk Kegiatan Reatif dan Rekreatif Yang Ramah Anak, di Luar Sekolah.

Klaster V tentang perlindungan khusus yang meliputi;¹⁸ (1) Presentase anak dalam kategori perlindungan khusus yang mendapat layanan. (2) Persentase Penyelesaian Kasus Dengan Proses Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. (3) Tersedia Mekanisme Penanggulanga Bencana Yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak. (4) Presentase Anak Yang dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah Implementasi, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan diinginkan.¹⁹ Salusu mengartikan bahwa implementasi sebagai oprasional dari berbagai aktifitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh suatu jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.²⁰ Implemetasi pemenuhan hak anak di

¹⁸ Ibit, hal. 29.

¹⁹ Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto, *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 1, Hal. 121, dalam, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6469title=Evaluasi%20Mandiri%20Kepegawaian%20Berdasarkan%20Perpres%20No.%2054%20Tahun%202010%20di%20Badan%20Kepegawaian%20Daerah%20Kota%20Malang%29> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 17;32 Wib.

²⁰ Arifin Tahir, *Analisis Implementasi Kebijakan Empat Pilar Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo*, hal. 19, dalam <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFJACahUKEwicq7XQivnIAhUFo5QKHfgBAII&url=http%3A%2Frepository.ung.ac.id%2Fget%2Fkaryailmiah%2F71%2FANALISIS-IMPLEMENTASI-KEBIJAKAN-EMPAT-PILAR-PENGEMBANGAN->

Kabupaten Boyolali dilakukan oleh BP3AKB atas kerja sama antar SKPD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pemenuhan hak anak sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melalui Program Kota/Kabupaten Layak Anak.

Penguatan kelembagaan tersebut meliputi;²¹ 1) jumlah Perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak pada tahun 2014 sebanyak 14 yang terdiri dari 3 Perda, 1 Perbub, serta 9 SK dan pada tahun 2015 sebanyak 6 SK. 2) Anggaran pemenuhan hak anak pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.515.935.000,00 (dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.649.309.500,00 (dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu limaratus rupiah). 3) Jumlah SDM terlatih KHA sebanyak 611. 4) Keterlibatan lembaga masyarakat dan media masa dalam pemenuhan hak anak antarlain PKK, LSM PREPARI dan LK3. 5) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak meliputi BUMD dan PAN BROTHER. 6) Jumlah kegiatan inovatif ada 6.

Klaster I tentang hak sipil dan kebebasan yang meliputi;²² 1) Presentase anak yang diregistasi dan mendapat kutipan akta kelahiran sebanyak 228.265 anak pada tahun 2014 dan 209.378 anak pada tahun 2015. 2) Fasilitas informasi anak yaitu

UNIVERSITAS-NEGERIGORONTALO.pdf&usg=AFQJCNCSibCpgxLvMjr-V452pDpJ16ppbw , diakses Pada Hari Kamiis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 18:01 Wib.

²¹ Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Boyolali Tahun 2015*, Boyolali, BP3AKB, hal. 1.

²² *Ibit*, hal. 15.

dengan disediakan 1 perpustakaan keliling dan 1 perpustakaan umum. 3) presentase forum anak sebanyak 1 forum anak ada di Kabupaten dan 1 ada di Kecamatan. 4) Jumlah kegiatan forum anak ada 3.

Klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternanif yang meliputi;²³ 1) Presentase usia perkawinan pertama usia dibawah 18 tahun sebanyak 2.179 perempuan dan 35 laki-laki pada tahun 2014 dan sebanyak 436 perempuan dan 16 laki-laki di tahun (2015 Januari-Maret). 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang memberikan layanan pengasuhan dan perawatan anak sebanyak 8 lembaga. 3) tersedia program pengasuhan berkelanjutan bahwa saat ini pengasuhan anak masih melibatkan keluarga terdekat.

Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi;²⁴ 1) Angka kematian bayi pada tahun 2014 sebanyak 41 bayi dan 2015 sebanyak 9 bayi. 2) Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting, dan gizi lebih pada balita yaitu 0,9 % gizi buruk, 5,0 % gizi kurang, stunting sebanyak 15,1 % dan gizi lebih sebanyak 2,3 % pada tahun 2014. 3) Presentase asi eksklusif sebanyak 5.004 bayi dari 8.109 bayi. 4) Presentase puskesmas ramah anak sebanyak 7 dari 29 puskesmas. 5) Presentasi imunisasi dasar lengkap sebanyak 75.633 balita. 6) Jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja sebanyak 5. NAPZA sebanyak 1 rumasakit, HIV/AIDS sebanyak 5, lembaga layanan kesehatan sebanyak 3, layanan anak disabilitas sebanyak 2 lembaga. 7) presentase anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan sebanyak 154.530 melalui program beasiswa. 8) presentase rumah tangga dengan air bersih 34. 079 rumah tangga dari

²³ *Ibit*, hal. 24.

²⁴ *Ibit*, hal. 32.

273.923 rumah tangga. 9) Tersedianya kawasan tanpa rokok terdapat pada sekolah serta di Kantor Bupati.

Klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi;²⁵ 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini berjumlah 24.491 anak. 2) Presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun pada tingkat SD/MI sebanyak 84,68 % SMP/Mts sebanyak 68,61 %, dan SMA/MA/Sederajat 49,75 %. 3) Presentase sekolah ramah anak belum ada karena ada criteria yang belum terpenuhi. 4) Jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke sekolah sebanyak 39 sekoalahan. 5) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak di luar sekolah ada 2.

Klaster V perlindungan kusus yang meliputi; 1) Presentase anak dalam kategori khusus yang mendapat layanan sebanyak 37 anak korban dan saksi, anak yang menjadi korban pornografi sebanyak 37 dan anak dengan HIV/AIDS sebanyak 7. 2) presentase penyelesaian kasus dengan proses *diversi* bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 37 kasus yang berhasil di *diversi* ditingkat penyidikan, 2 kasus ditingkat penuntutan. 3) Tersedianya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak dilakukan dengan cara memberikan kesehatan anak, menu makanan khusus anak, pendidikan darurat, pendataan anak, penelusuran keluarga dan penyatuan kembali dengan keluarga serta di berikanya layanan psikososial dan *trauma healing*. 4) Presentase anak yang di bebaskan dari bentuk-bentk pekerjaan terburuk anak sebanyak 270 anak.

²⁵ Ibit, hal. 49.

Kendala Yang di Jumpai BP3AKB dalam Menjalankan Kota Layak Anak di Wilayah Kabupaten Boyolali

Kendala yang sering dijumpai BP3AKB dalam menjalankan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali yaitu berkaitan dengan ***Komitmen*** tiap-tiap individu yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemenuhan hak anak. Semisal SKPD terkait pemenuhan hak anak telah diberikan jangka waktu tertentu untuk melaporkan hasil kegiatan pemenuhan hak anak kepada BP3AKB, ternyata masih ada SKPD yang telat dalam memberikan Laporan Pertanggung Jawabnya (LPJ) kepada BP3AKB. Komitmen yang masih lemah tersebut tentu akan ikut menghambat pula kinerja BP3AKB.

Secara konseptual, dengan mengacu pandangan Lawrence M. Fridman, pada hakekatnya meliputi tiga komponen yang terjalin sebagai satu kesatuan.²⁶ Ketiga komponen tersebut antara lain;²⁷ 1) Komponen substansi hukum (*legal substance*) Yakni komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Dari segi substansi hukum BP3AKB dalam menjalankan pemenuhan hak anak tidak ada kendala.²⁸ 2) Komponen struktur hukum (*legal structure*) Yakni komponen yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban serta sumberdaya yang terlibat di dalamnya. Dari segi struktur penegak hukum/pelaksana/lembaga terkait pemenuhan hak anak yaitu masih kurangnya ***komitmen*** dari semua unsur baik pemerintah, non

²⁶ Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 22.

²⁷ *Loc cit*, hal. 22.

²⁸ Dinuk Pribandini, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12:32 Wib.

pemerintah, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan fungsinya masing-masing.²⁹ **Komitmen** yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab masing-masing individu terkait dengan pelaksana pemenuhan hak anak. Misalnya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak melalui program kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.³⁰ 3) Komponen budaya hukum (*legal culture*) Yakni komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga di anut dan apa yang di anggap buruk sehingga harus di hindari. Dari segi kultur bahwa terdapat kurangnya pemahaman dari unsur-unsur terkait tentang pemenuhan hak-hak anak.³¹ Kurangnya pemahaman tersebut bisa dari unsur masyarakat maupun keluarga.³²

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul; Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Anak. maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, pemenuhan hak anak sebagaimana dicantumkan dalam 31 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

²⁹ Dinuk Pribandini, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12;37 Wib.

³⁰ Dinuk Pribandini, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12;38 Wib.

³¹ Dinuk Pribandini, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12;18 Wib.

³² Dinuk Pribandini, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12;21 Wib.

Tentang Perlindungan Anak. Beserta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

Kedua, implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali yaitu dengan dilaksanakannya 31 Indikator kota layak anak dengan cara melakukan kerja sama antar SKPD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pemenuhan hak anak sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melalui Program Kota/Kabupaten Layak Anak. Pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh BP3AKB dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemenuhan hak anak.

Ketiga, kendala yang sering dijumpai BP3AKB dalam menjalankan Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali yaitu berkaitan dengan ***komitmen*** tiap-tiap individu yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemenuhan hak anak. Semisal SKPD terkait pemenuhan hak anak telah di berikan jangka waktu tertentu untuk melaporkan hasil kegiatan pemenuhan hak anak kepada BP3AKB, ternyata masih ada SKPD yang telat dalam memberikan Laporan Pertanggung Jawabnya (LPJ) kepada BP3AKB. Komitmen yang masih lemah tersebut tentu akan ikut menghambat pula kinerja BP3AKB.

Saran

Pertama, bagi pemerintah, dalam rangka mensukseskan pemenuhan hak anak maka komitmen yang baik haruslah segera dimiliki oleh tiap pegawai masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kedua, sekolah perlu menerapkan proses belajar mengajar yang baik, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya kekerasan. Guru harus menjadi contoh yang baik kepada murid/siswa sehingga dapat tercipta sekolah yang ramah anak untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang baik dari segi moral dan prestasi.

Ketiga, masyarakat sebagai lingkungan bermain anak perlu untuk menciptakan suasana yang mendidik bagi anak. Seperti memberikan contoh yang baik kepada anak dengan cara berbicara dan bertingkah secara sopan dihadapan anak.

Keempat, keluarga sebagai pihak terdekat anak maka perlu memberikan waktu untuk memperhatikan anak dengan cara memberi contoh perilaku yang baik seperti berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Orang tua juga perlu memberikan teguran serta pengertian ketika anak melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku;

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kusuma, Hilman Hadi, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Edisi 2015), Berkas di peroleh dari dokumen BP3AKB Kabupaten Boyolali Pada hari Senin Tanggal 27 April 2015 Pukul 08; 15 Wib.

Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Soemito, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Dellyana, Shanti, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung, Alumni.

Literatur Undang-undang;

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 paska amandemen.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Literatur Internet

Tahir, Arifin, *Analisis Implementasi Kebijakan Empat Pilar Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo*, dalam <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFJACahUKEwicq7XQivnIAhUfo5QKHfgBA1I&url=http%3A%2Frepository.ung.ac.id%2Fget%2Fkaryailmiah%2F71%2FANALISIS-IMPLEMENTASI-KEBIJAKAN-EMPAT-PILAR-PENGEMBANGAN-UNIVERSITAS-NEGERIGORONTALO.pdf&usg=AFQJCNCSlbCpgxLvMjr-V452pDpJ16ppbw> , diakses Pada Hari Kamiis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 18;01 Wib.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 01/ Pid. Sus. Anak / 2015/ PN. Byl*, dalam www.putusan.mahkamahagung.go.id, diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2015, Pukul 21;14 Wib.

Pengertian Kebijakan Publik Dan Pemerintah Definisi Menurut Para Ahli Serta Komponenya, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-publik-da.html> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 18;35 Wib.

Anggraeni, Ratih, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto, *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 1, dalam, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6469title=Evaluasi%20Mandiri%20Kepegawaian%20Berdasarkan%20Perpres%20No.%2054%20Tahun%202010%20di%20Badan%20Kepegawaian%20Daerah%20Kota%20Malang%29> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 17;32 Wib.

Muninggar, Retno, 2012, *Pengantar Ilmu Kebijakan*, Dalam <http://himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2014/04/Pengantar-Ilmu-Kebijakan-Minggu-2-2012.pdf> , diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2015, Pukul 17;07 Wib.

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Boyolali Tahun 2015*, Boyolali, BP3AKB.

Literatur Wawancara;

Pribandini, Dinuk, Ka. Bidang PPPA Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Rabu, 30 September 2015, Pukul 12;32 Wib.